

BAB I

PENDAHULUAN

A. Analisis Masalah

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memudahkan masyarakat memperoleh, membagikan, dan mengakses informasi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Transformasi digital melalui internet dan berbagai perangkat komunikasi menciptakan ekosistem informasi yang lebih dinamis, sehingga opini individu dapat dengan cepat memengaruhi persepsi kolektif masyarakat.¹Kondisi ini turut meningkatkan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang transparan, akuntabel, serta mampu menyediakan informasi yang cepat, jelas, dan terbuka sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.²

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu prinsip fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Pemerintah Indonesia mengatur hal tersebut melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menegaskan bahwa setiap badan publik berkewajiban untuk menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan

¹ Suhendra, & Pratiwi, F. S. (2024). Peran Komunikasi Digital dalam Pembentukan Opini Publik: Studi Kasus Media Sosial. *Prosiding: Resiliensi Indonesia dalam Pusaran Disrupsi Global*, 293-315. <https://doi.org/10.30589/proceedings.2024.1059>

² Handoko. (2025, Januari 21). *Keterbukaan Informasi Publik di Era Digital*. DJPb Kemenkeu. Retrieved Oktober 29, 2025, from <https://djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/ntt/id/profil/309-lkpp/3394-keterbukaan-informasi-publik-di-era-digital.html>

informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan kepada masyarakat. Ketentuan ini juga menuntut badan publik untuk lebih terbuka dalam memberikan data dan informasi yang benar, akurat, serta tidak menyesatkan.³

Adapun UU No. 14 Tahun 2008 secara khusus mengatur kewajiban badan publik untuk menyediakan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Pasal 7 UU tersebut menegaskan bahwa informasi yang disampaikan harus bebas dari kesalahan dan tidak menimbulkan salah tafsir maupun disinformasi yang berpotensi merugikan publik. Dengan demikian, kewajiban ini tidak hanya sebatas penyediaan informasi, tetapi juga memastikan kualitas, kebenaran, dan keandalan data yang disajikan kepada masyarakat.⁴ Implementasi keterbukaan informasi publik di era digital telah mengubah pola komunikasi antara pemerintah dan masyarakat melalui penyebaran informasi yang lebih cepat, interaktif, dan menjangkau masyarakat luas. Selain sebagai sarana penyebaran informasi, media digital juga berperan dalam mendorong partisipasi publik, edukasi, dan pembentukan citra lembaga yang kredibel.⁵

Dengan memanfaatkan teknologi digital secara optimal, lembaga pemerintah mampu memperkuat hubungan dengan publik,

³ *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik*

⁴ *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 7 Tentang Keterbukaan Informasi Publik*

⁵ Handoko. (2025, Januari 21). *Keterbukaan Informasi Publik di Era Digital*. DJPb Kemenkeu. Retrieved Oktober 29, 2025, from <https://djp.b.kemenkeu.go.id/kanwil/ntt/id/profil/309-lkpp/3394-keterbukaan-informasi-publik-di-era-digital.html>

mendukung transparansi, dan memperluas ruang partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintahan. Oleh sebab itu, implementasi keterbukaan informasi publik di era digital tidak hanya sebagai kewajiban administratif, melainkan sebuah strategi penting untuk membangun pemerintahan yang responsif, terpercaya, dan inklusif.⁶

Sejalan dengan tuntutan keterbukaan informasi di era digital, keberhasilan upaya tersebut sangat bergantung pada bagaimana pemerintah mengelola komunikasi publik secara efektif. Dengan kata lain, transparansi tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan informasi, tetapi juga oleh cara informasi tersebut dikemas dan disampaikan kepada masyarakat. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, komunikasi publik berperan sebagai alat strategis untuk membentuk opini publik dan meningkatkan partisipasi dalam kebijakan atau program tertentu.⁷ Komunikasi publik adalah proses penyebaran pesan dari lembaga atau individu kepada khalayak luas secara langsung maupun melalui media massa. Menurut Joseph A. Devito (2011), tujuan komunikasi publik adalah untuk menyampaikan informasi, mendidik, atau memengaruhi masyarakat secara masif.

⁶ Maulina, S. (2024, Juli 29). *Tantangan Teknologi dalam Keterbukaan Informasi Publik*. PPID Unair. <https://ppid.unair.ac.id/akses-informasi-publik-digital/>

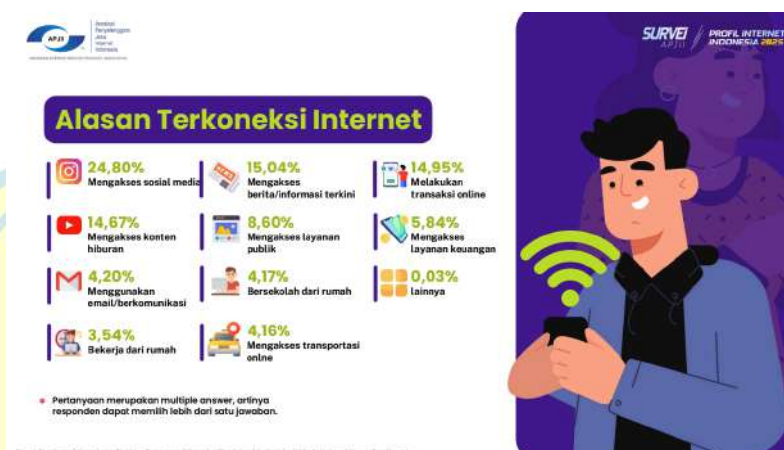
⁷ Husna, S. N., & Ayuh, E. T. (2025, Agustus 12). Studi Tentang Strategi Komunikasi Publik Kominfo Kota Bengkulu dalam Mendorong Literasi di Masa Transformasi Digital. *Federalisme : Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi*, 2(3), 208-217.

Perkembangan teknologi digital telah menggeser komunikasi publik ke media sosial yang memungkinkan penyebaran informasi secara cepat, luas, dan interaktif. Karakteristiknya yang partisipatif menjadikan masyarakat tidak hanya sebagai penerima informasi, tetapi juga berperan dalam membentuk opini publik. Hal ini sejalan dengan Silalahi (2004) yang menyatakan bahwa komunikasi pemerintahan tidak hanya berkaitan dengan penyampaian informasi, tetapi juga bagaimana pesan dipersepsikan dan memengaruhi masyarakat.⁸

Dengan demikian, media sosial menjadi ruang utama bagi masyarakat untuk mencari, mengakses, dan memvalidasi informasi terkait isu publik, sehingga meningkatkan ketergantungan masyarakat terhadap internet sebagai sumber informasi. Kondisi tersebut menuntut pengelolaan komunikasi publik yang terencana, akurat, dan mudah dipahami, karena keberhasilannya tidak hanya ditentukan oleh penggunaan kanal digital, tetapi juga oleh kualitas dan konsistensi informasi yang disampaikan. Sejalan dengan hal tersebut, penggunaan internet di Indonesia semakin meluas dan telah menjadi bagian integral dari aktivitas masyarakat sehari-hari. Internet tidak hanya dimanfaatkan sebagai sarana hiburan dan komunikasi personal, tetapi juga sebagai sumber utama dalam memperoleh informasi publik yang cepat dan aktual. Berdasarkan Survei Penetrasi Internet Indonesia oleh

⁸ Silalahi, U. (2004). Komunikasi Pemerintahan: Mengirim dan Menerima Informasi Tugas dan Informasi Publik. *Jurnal Administrasi Publik*, 3(1), 36-54.

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, salah satu alasan utama masyarakat terhubung ke internet adalah untuk mengakses berita dan informasi terkini, yakni sebesar 15,04%.⁹ Berikut ini adalah hasil survei yang telah dilakukan:



Gambar 1.1 Survei alasan masyarakat Indonesia terkoneksi internet

Temuan ini menunjukkan bahwa internet telah menjadi salah satu sumber utama masyarakat dalam memperoleh informasi. Oleh karena itu, pemerintah perlu menyediakan informasi publik yang cepat, akurat, kredibel, dan mudah diakses melalui berbagai kanal digital. Salah satu kanal digital yang paling banyak dimanfaatkan dalam penyebaran informasi publik saat ini adalah media sosial, seiring dengan tingginya jumlah pengguna aktif dan intensitas penggunaan media sosial di Indonesia.¹⁰

⁹ Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. (2025). *Survei alasan masyarakat Indonesia terkoneksi internet*. <https://survei.apjii.or.id/>

¹⁰ Kemp, S. (2025, February 25). *Digital 2025: Indonesia DataReportal Global Digital Insights*. DataReportal. Retrieved December 14, 2025, from <https://datareportal.com/reports/digital-2025-indonesia>

Media sosial berperan sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat melalui penyampaian informasi mengenai kebijakan, program, dan kegiatan secara cepat, mudah dipahami, serta memungkinkan interaksi yang lebih responsif. Hal ini sejalan dengan Syarif *et al.* (2025) yang menegaskan bahwa pengelolaan konten media sosial yang terencana dan terarah diperlukan agar komunikasi publik pemerintah berjalan efektif dan kredibel. Oleh karena itu, setiap lembaga pemerintah, termasuk satuan kerja di sektor pendidikan, dituntut mampu mengelola penyampaian informasi secara efektif melalui media sosial yang tidak hanya berfungsi sebagai sarana publikasi, tetapi juga sebagai media edukasi dan pembentukan persepsi publik terhadap kinerja lembaga.

Sebagai salah satu unit kerja di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Direktorat Sekolah Menengah Pertama (Direktorat SMP) memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan sekolah menengah pertama dan pendidikan kesetaraan sekolah menengah pertama sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 Pasal 155.¹¹ Dalam rangka mendukung fungsi tersebut, Direktorat SMP perlu menyampaikan

¹¹ Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 Pasal 155.

informasi program, kebijakan, serta capaian kinerja kepada masyarakat secara terbuka dan mudah dipahami.

Merujuk pada Tugas dan Fungsi Direktorat Sekolah Menengah Pertama yang tertuang dalam Permendikbud No. 45 tahun 2019 dan UU No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Direktorat Sekolah Menengah Pertama memiliki tantangan yang harus direspon dalam rangka meningkatkan dan menyediakan layanan yang cepat, tepat dan akuntabel. Dengan kemajuan teknologi yang saat ini berkembang dengan cepat serta menjadi akses yang dekat dengan daerah, Direktorat Sekolah Menengah Pertama menjadikan berbagai platform media sosial sebagai hal yang mampu menunjang peningkatan kualitas layanan dan percepatan pelayanan informasi kepada daerah.¹²

Untuk menunjang fungsi tersebut, Direktorat SMP membentuk Tim Publikasi dan Kerja sama yang memiliki peran strategis dalam mengelola aktivitas komunikasi publik dan publikasi digital. Tim ini dibentuk berdasarkan kebutuhan lembaga untuk memiliki unit khusus yang menangani penyebaran informasi, publikasi kegiatan, serta pengelolaan kanal komunikasi resmi, baik melalui situs web maupun media sosial.¹³ Tim Publikasi berperan memastikan informasi yang disampaikan Direktorat SMP kepada masyarakat memiliki kejelasan,

¹² Permendikbud No. 45 tahun 2019 dan UU No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

¹³ Keputusan Direktur Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah. *Rincian Tugas di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

konsistensi, dan daya tarik sesuai karakteristik audiens, sehingga kebijakan, program, dan capaian Direktorat SMP dapat tersampaikan secara luas, akurat, dan mudah dipahami, khususnya oleh pendidik, peserta didik, dan pemangku kepentingan pendidikan.

Dalam praktiknya, Tim Publikasi dan Kerja Sama Direktorat SMP memanfaatkan berbagai platform digital, seperti Instagram, YouTube, X (Twitter), dan website sebagai kanal komunikasi publik. Platform tersebut digunakan untuk menyebarkan informasi mengenai kebijakan, program, kegiatan, inovasi pembelajaran, serta profil Direktorat SMP, sekaligus membangun citra positif lembaga dan memperkuat hubungan dengan masyarakat. Penyampaian informasi tersebut diwujudkan dalam berbagai bentuk konten komunikasi publik yang disesuaikan dengan karakteristik media dan tujuan komunikasi. Berikut merupakan bentuk-bentuk konten komunikasi publik yang diproduksi dan dipublikasikan oleh Direktorat SMP melalui berbagai kanal digital.

Tabel 1.1 Bentuk-bentuk konten komunikasi publik dan Platform Publikasi Direktorat SMP

Bentuk Konten	Platform Media Sosial (Publikasi)				
	<i>Website</i>	<i>Instagram</i>	<i>Twitter (X)</i>	<i>Tiktok</i>	<i>YouTube</i>
Siaran Pers	☒	☒	☒	☐	☐
Berita	☒	☒	☒	☐	☐
Artikel kebijakan/ informasi	☒	☒	☒	☐	☐

Artikel Ringan	☒	☒	☒	☐	☐
----------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------

Berdasarkan Tabel di atas, Direktorat SMP memanfaatkan *website*, *Instagram*, dan *Twitter (X)* sebagai kanal publikasi konten komunikasi publik. Website digunakan untuk menyajikan informasi secara lengkap, sedangkan Instagram dan Twitter berfungsi menyebarluaskan informasi secara ringkas sekaligus mengarahkan masyarakat untuk mengakses informasi lebih lanjut melalui website resmi Direktorat SMP. Namun demikian, pelaksanaan Publikasi dan Kerja Sama di Direktorat SMP masih menghadapi berbagai tantangan. Berdasarkan hasil wawancara tidak terstruktur dengan *Person in Charge (PIC)* dan Staf Publikasi dan Kerja Sama Direktorat SMP, diketahui bahwa belum terdapat staf khusus yang secara konsisten menangani penyusunan konten komunikasi publik. Selama ini, proses perencanaan dan produksi konten dilakukan secara kolaboratif oleh staf, peserta magang, dan terkadang tenaga bantu eksternal. Kondisi tersebut menyebabkan belum adanya sistem kerja yang baku, sehingga kualitas dan konsistensi konten masih bergantung pada kemampuan individu, yang berdampak pada ketidakteraturan publikasi, variasi gaya bahasa, dan penyampaian pesan.

Belum tersedianya SOP baku atau pedoman tertulis milik Direktorat SMP yang dapat dijadikan acuan turut memperburuk kondisi tersebut. Mekanisme pembelajaran terkait penulisan, penyusunan ide konten, hingga pengelolaan karakter komunikasi kelembagaan selama

ini dilakukan secara lisan dari *Person in Charge (PIC)* Tim kepada anggota tim yang terlibat. Pola kerja yang informal dan tidak terdokumentasi dengan jelas berpotensi menimbulkan perbedaan persepsi, kesalahan penyampaian pesan, serta ketidakkonsistenan format dalam proses publikasi. Akibatnya, setiap anggota tim harus menyesuaikan secara mandiri atau belajar melalui contoh konten terdahulu, sehingga proses kerja menjadi kurang efisien dan konsistensi pesan lembaga cenderung sulit dipertahankan.

Permasalahan lain yang dihadapi adalah perpindahan staf antar unit kerja yang tidak disertai mekanisme alih pengetahuan secara terstruktur, sehingga anggota baru perlu beradaptasi kembali terhadap pola kerja maupun prinsip komunikasi publik yang berlaku. Selain itu, tidak seluruh anggota Tim Publikasi dan Kerja Sama memiliki latar belakang di bidang komunikasi dan publikasi. Kondisi tersebut berdampak pada menurunnya efektivitas kerja, ketidakkonsistenan penerapan standar penyusunan konten, serta proses penyusunan konten yang membutuhkan waktu lebih lama. .

Berbagai kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan kompetensi dan kebutuhan akan sumber belajar yang sistematis dalam mendukung kinerja Staf Publikasi dan Kerja sama Direktorat SMP. Hal ini ditunjukkan dengan dampak langsung yang terjadi pada efektivitas kinerja komunikasi publik Direktorat SMP. Ketidakstabilan frekuensi publikasi dan ketidakkonsistenan gaya penyampaian pesan membuat

citra komunikasi lembaga menjadi kurang kohesif dan sulit dikenali oleh publik sebagai satu identitas yang utuh. Proses produksi konten yang tidak terstandar juga menyebabkan waktu pengerjaan menjadi lebih lama, karena setiap anggota tim harus menyesuaikan gaya masing-masing atau mempelajari ulang format yang digunakan sebelumnya.

Selain itu, risiko kesalahan penulisan informasi atau penyampaian pesan yang kurang tepat menjadi lebih tinggi, sehingga berpotensi memunculkan kesalahpahaman atau pertanyaan berulang dari publik. Pada beberapa kasus, konten harus direvisi atau bahkan dihapus (*takedown*) setelah dipublikasikan karena dianggap kurang tepat atau tidak sesuai dengan standar yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa ketiadaan acuan baku tidak hanya menghambat produktivitas, tetapi juga berdampak pada kualitas, konsistensi, dan kredibilitas komunikasi publik yang dilakukan Direktorat SMP.

Dalam lingkup teknologi pendidikan yang memiliki peranan dalam memfasilitasi pembelajaran dan meningkatkan kinerja sesuai dengan definisi AECT 2004 yaitu "*Educational technology is the study and ethical practice of facilitating learning and improving performance by creating, using, and managing appropriate technological processes and resources*".¹⁴ Teknologi pendidikan memiliki peran strategis dalam mendukung terfasilitasinya proses belajar dan peningkatan kinerja

¹⁴ Prawiradilaga, D. S. (2016). *Wawasan Teknologi Pendidikan*. Jakarta: Prenada Media Group.

melalui penyediaan intervensi pembelajaran yang dirancang secara sistematis dan kontekstual¹⁵.

Dalam implementasinya, peran tersebut menjadi relevan ketika suatu organisasi menghadapi permasalahan kinerja yang dipengaruhi oleh perbedaan tingkat pemahaman, variasi praktik kerja, serta belum tersedianya acuan yang dapat dijadikan rujukan bersama. Kondisi proses penyusunan konten komunikasi publik oleh Tim Publikasi dan Kerja sama Direktorat SMP menunjukkan perlunya suatu intervensi pembelajaran yang mampu menyatukan pemahaman dan praktik kerja secara konsisten melalui penyediaan sumber belajar yang terdokumentasi, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan kerja.

Kebutuhan sumber belajar tersebut menjadi semakin relevan dibandingkan dengan penyediaan pelatihan, apabila mempertimbangkan kondisi kerja Tim Publikasi dan Kerja sama Direktorat SMP. Jadwal kerja Tim Publikasi yang dinamis serta keterlibatan dalam berbagai kegiatan lapangan menyebabkan keterbatasan waktu untuk mengikuti pelatihan yang bersifat terjadwal. Selain itu, adanya rotasi atau staff shuffle mengharuskan pelaksanaan pelatihan dilakukan kembali bagi anggota baru, sehingga berdampak pada meningkatnya kebutuhan waktu dan biaya. Oleh karena itu, sumber belajar yang dapat diakses secara mandiri dan fleksibel menjadi solusi yang lebih efisien, berkelanjutan, dan adaptif terhadap

¹⁵ Prawiradilaga, D. S., & Chaeruman, U. A. (2018). *Modul Hypercontent Teknologi Kinerja (Performance Technology)*. Jakarta: Kencana.

kebutuhan tim. Hal ini juga sejalan dengan prinsip pembelajaran orang dewasa yang menekankan pembelajaran berbasis kebutuhan dan dapat diterapkan langsung dalam konteks kerja.¹⁶

Sumber belajar adalah semua sumber termasuk alat, bahan, teknik, lingkungan, dan orang yang mungkin dipergunakan oleh pemelajar baik secara sendiri-sendiri maupun dalam bentuk gabungan untuk memfasilitasi kegiatan belajar dan meningkatkan kinerja.¹⁷ Sesuai dengan definisinya, sumber belajar memiliki fungsi utama sebagai sarana untuk membantu individu memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan pembelajaran dan peningkatan kinerja.

Sumber belajar dalam konteks permasalahan tim Publikasi dan Kerja sama ini berperan penting dalam menyediakan acuan dan pedoman kerja yang sistematis untuk menunjang proses produksi konten publikasi yang informatif, kredibel, dan sesuai kebijakan kelembagaan. Namun, hingga saat ini belum tersedia sumber belajar yang terstruktur secara komprehensif dan mudah diakses untuk mendukung pengembangan kompetensi tim, khususnya dalam hal penulisan naskah konten publikasi digital. Oleh karena itu, diperlukan suatu sumber belajar yang tidak hanya menyajikan informasi secara

¹⁶ Sumiyarno. (2007). Pembelajaran Orang dewasa berbasis Andragogi: Tinjauan Teori. *Jurnal Ilmiah VISI PTK-PNF*, 2(1), 49-55.

¹⁷ Januzweski, A., & Molenda, M. (2008). *Educational Technology: A Definiton with Commentary*. New York: Lawrence Erlbaum Associates.

teoritis, tetapi juga mampu memfasilitasi proses belajar mandiri dan aplikatif.

Sesuai permasalahan yang telah disebutkan di atas dan kaitannya sebagai teknolog pendidikan dalam memfasilitasi kegiatan belajar untuk meningkatkan kinerja yang salah satunya dapat melalui kawasan pengembangan maka, dapat disimpulkan bahwa diperlukan pengembangan produk sebuah sumber belajar berupa buku pedoman. Buku pedoman ini dapat menjadi acuan baku sekaligus sarana pengembangan kompetensi bagi Staf Publikasi dan Kerja sama serta pihak yang terlibat dalam penyusunan konten komunikasi publik. Hal ini sejalan dengan prinsip pembelajaran orang dewasa yang dikemukakan Knowles (1984), yang menekankan bahwa pemelajar dewasa belajar lebih efektif melalui sumber yang relevan dengan pekerjaan dan dapat diakses secara mandiri.¹⁸ Selain itu, menurut Heinich *et al.* (2002), sumber belajar yang terstruktur dan terdokumentasi berperan penting sebagai pedoman bagi pembelajar untuk memperoleh keterampilan dan pengetahuan secara sistematis.¹⁹ Oleh karena itu, pengembangan buku pedoman ini menjadi langkah strategis untuk memastikan konsistensi, kualitas, dan efektivitas praktik kerja Tim Publikasi dan Kerja sama dalam menyusun konten komunikasi publik.

¹⁸ Knowles, M. S. (1984). *Andragogy in action: Applying modern principles of adult learning*. San Francisco, CA: Jossey-Bass.

¹⁹ Heinich, R., Molenda, M. H., Russell, J. D., & Smaldino, S. E. (2002). *Instructional Media and Technologies for Learning*. Prentice Hall College.

Selain itu, buku pedoman dipilih sebagai sumber belajar karena dominan materi yang disajikan berupa ketentuan, prinsip, dan aturan dalam penyusunan konten komunikasi publik yang berfungsi sebagai acuan dan standar dalam pelaksanaan komunikasi publik. Materi dengan karakteristik tersebut menuntut pemahaman terhadap prinsip, ketentuan, serta keterkaitan antar unsur dalam suatu sistem kerja, sehingga perlu disajikan secara terstruktur dan sistematis, karena pengolahan isi materi pembelajaran perlu memperhatikan struktur pengetahuan di dalamnya agar dapat dipahami secara utuh oleh pengguna.²⁰ Struktur konten seperti ini selaras dengan kebutuhan substansi buku pedoman, karena proses produksi konten komunikasi publik di Direktorat SMP menuntut pemahaman.

Selain karakteristik materi, karakteristik pengguna juga menjadi pertimbangan dalam menentukan sumber belajar yang sesuai. Materi penyusunan konten komunikasi publik didominasi oleh pengetahuan konseptual yang memuat ketentuan, prinsip, dan standar sebagai acuan pelaksanaan komunikasi publik, namun juga mencakup pengetahuan prosedural, seperti tahapan penyusunan dan publikasi konten. Karakteristik materi tersebut memerlukan penyajian yang sistematis agar pengguna memahami keterkaitan antar konsep sekaligus didukung visualisasi, seperti diagram alur atau video, untuk

²⁰ Manurung, J. P., Haloho, B., & Napitu, U. (2023). Mengembangkan Bahan Ajar Dalam Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) di Sd. *Jurnal Pendidikan Mandala*, 8(2), 676-683.

mempermudah pemahaman terhadap materi yang bersifat prosedural.²¹

Di sisi lain, Tim terbiasa memanfaatkan perangkat digital, seperti komputer dan gawai, dalam pelaksanaan tugas serta sering bekerja di luar kantor maupun melakukan koordinasi lintas lokasi. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya sumber belajar yang mampu menyajikan materi secara terstruktur sekaligus mudah diakses secara fleksibel sesuai dengan karakteristik pekerjaan pengguna.

Sejalan dengan pandangan Musnaini, Suherman, Wijoyo, dan Indrawan yang menekankan bahwa digital merupakan pendekatan yang bersifat fleksibel dan telah menjadi bagian penting dalam kehidupan dan aktivitas manusia, format digital memungkinkan buku pedoman ini diakses secara lebih luwes tanpa terikat ruang dan waktu.²² Dengan demikian, pemilihan format digital dinilai relevan dengan karakteristik Tim Publikasi dan Kerja sama Direktorat SMP yang kerap bekerja di luar kantor, menghadiri kegiatan lapangan, serta melakukan koordinasi lintas lokasi.

Hal ini juga relevan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Aprianisa Dea Amanda (2025) dengan judul penelitian yaitu “Pengembangan Buku Pedoman “Pengembangan

²¹ Ariani, D. (2021). *Buku Panduan Visualisasi berdasarkan Ragam Pengetahuan*. Universitas Negeri Jakarta.

²² Wisyaningsih, B., Ashlihah, & Afan, T. I. (2024). Peran Manajemen Resiko dalam Meningkatkan Ketahanan Bank Syariah di Era Digital. *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 9(3), 1459-1470. <https://www.doi.org/10.30651/jms.v9i3.22933>

Media Presentasi” di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia”. Dalam penelitian tersebut, buku pedoman yang memuat langkah-langkah pengembangan media presentasi termasuk menguraikan secara rinci mulai dari perencanaan, desain, dan produksi, hingga evaluasi media presentasi dengan bentuk digital mampu memudahkan diseminasi di Kementerian Kesehatan. Selain itu, buku pedoman Pengembangan Media Presentasi dinilai sangat layak untuk digunakan sebagai acuan dalam mengembangkan media presentasi di lingkungan Kementerian Kesehatan.²³

Sehingga dapat disimpulkan bahwa, buku pedoman digital ini tidak hanya berfungsi sebagai panduan teknis penulisan dan penyusunan konten, tetapi juga sebagai sumber belajar yang memperkuat budaya komunikasi efektif, kreatif, dan berbasis prinsip keterbukaan informasi publik. Dengan adanya pedoman tersebut, diharapkan Tim Publikasi dan Kerja sama Direktorat SMP dapat bekerja secara lebih efisien, konsisten, dan profesional dalam menyusun serta menyebarluaskan konten komunikasi publik yang informatif, edukatif, dan selaras dengan visi Direktorat SMP dalam meningkatkan mutu pendidikan menengah pertama di Indonesia.

²³ Amanda, A. D. (2025). *Skripsi Pengembangan Buku Pedoman “Pengembangan Media Presentasi” di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia*. Universitas Negeri Jakarta.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan analisis masalah yang telah dijabarkan di atas maka, identifikasi masalah penelitian ini dapat teridentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi penyelenggaraan komunikasi publik di Direktorat SMP dalam penyusunan konten komunikasi publik berdasarkan prinsip dan standar baku yang berlaku?
2. Apa saja permasalahan yang dihadapi Tim Publikasi dan Kerja sama Direktorat SMP dalam menyusun konten komunikasi publik?
3. Apakah terdapat sumber belajar untuk konten komunikasi publik bagi tim Publikasi dan Kerja sama Direktorat SMP?
4. Apakah terdapat buku pedoman digital yang dapat digunakan sebagai acuan bagi Tim Publikasi dan Kerja Sama Direktorat SMP dalam menyusun konten komunikasi publik?
5. Bagaimana proses pengembangan Buku Pedoman Digital Penyusunan Konten Komunikasi Publik bagi Tim Publikasi dan Kerja Sama Direktorat SMP Kemendikdasmen RI?

C. Ruang Lingkup

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini akan difokuskan pada satu masalah saja dengan ruang lingkup sebagai berikut:

1. Rumusan Masalah

Penelitian ini difokuskan pada pengembangan Buku Pedoman Digital Penyusunan Konten Komunikasi Publik bagi Tim Publikasi dan Kerja Sama Direktorat SMP Kemendikdasmen RI dengan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Buku Pedoman Digital Penyusunan Konten Komunikasi Publik seperti apa yang sesuai dengan kebutuhan Tim Publikasi dan Kerja Sama Direktorat SMP Kemendikdasmen RI?
- b. Bagaimana kelayakan Buku Pedoman Digital Penyusunan Konten Komunikasi Publik bagi Tim Publikasi dan Kerja Sama Direktorat SMP Kemendikdasmen RI?

2. Jenis Produk

Produk berupa Buku Pedoman Digital yang difokuskan untuk Penyusunan Konten Komunikasi Publik. Adapun rincian dari produk yang dikembangkan adalah sebagai berikut:

a. Sasaran

Sasaran dari pengembangan buku pedoman digital ini adalah Tim Publikasi dan Kerja sama Direktorat SMP.

b. Tempat

Penelitian dilakukan di Direktorat SMP, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman, Gedung E, Lantai 15 Komp.Kemdikbud,

Senayan, RT.1/RW.3, Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10270.

D. Tujuan

Pengembangan ini memiliki tujuan untuk menghasilkan Buku Pedoman Digital Penyusunan Konten Komunikasi Publik bagi Tim Publikasi dan Kerja sama di Direktorat SMP Kemendikdasmen RI.

E. Kegunaan Pengembangan

Berdasarkan hasil yang telah dikemukakan maka, pengembangan ini diharapkan memiliki berbagai manfaat, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau studi banding kepada para teknolog pendidikan dalam mengembangkan buku pedoman digital atau sumber belajar serupa yang bertujuan memfasilitasi proses pembelajaran serta meningkatkan kinerja pengguna.
- b. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian teoritis di bidang teknologi pendidikan, khususnya terkait perancangan sumber belajar digital dan penyusunan konten komunikasi publik.
- c. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian teoritis di bidang teknologi pendidikan, khususnya terkait perancangan buku pedoman digital dan penyusunan konten komunikasi publik.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Direktorat SMP Kemendikdasmen RI

Memberikan pedoman standar dalam penyusunan konten komunikasi publik sehingga proses publikasi menjadi lebih konsisten, efektif, dan sesuai dengan tujuan kelembagaan.

b. Bagi Tim Publikasi dan Kerja sama

Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan acuan baku yang memudahkan penyusunan konten komunikasi publik secara lebih konsisten, efisien, dan mudah dipelajari oleh seluruh Tim Publikasi dan Kerja sama Direktorat SMP.

c. Bagi Pengembang

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengalaman praktis bagi pengembang dalam merancang dan mengimplementasikan buku pedoman digital yang informatif, relevan, dan sesuai kebutuhan kerja, sehingga dapat meningkatkan kompetensi pengembangan sumber belajar serta menjadi bekal di dunia profesional.